



## PERIKANAN BERKELANJUTAN DALAM Mendukung PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

BALI-Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada 11-12 Desember 2019 di Bali. Sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF menyelenggarakan kegiatan kolaboratif yang membahas tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan untuk menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia tengah menyongsong peralihan konsepsi dan praktik ekonomi dari yang bersifat tradisional ke konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan sosial ekonomi serta berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut. "Dengan luas laut mencapai 70% dari total luas wilayah, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja. Salah satu caranya ialah melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP, dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP" jelas Himawan Hariyoga, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

## PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG – PRAKARSA SEGITIGA KARANG (COREMAP-CTI)

COREMAP-CTI merupakan program yang dirancang untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang dan sumberdaya laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan dua sumber pendanaan yaitu hibah Bank Dunia dan Asian Development Bank program ini memiliki pendekatan strategis masing-masing untuk menghasilkan model inovasi pembangunan dalam ranah pengelolaan ekosistem pesisir dan terumbu karang, serta mendukung upaya penanganan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan.

## HASIL PENILAIAN CALL FOR PORPOSAL DANA HIBAH BANK DUNIA



Jakarta- Sebagai Lembaga Wali Amanat Nasional (National Trust Fund) dalam bidang penanganan perubahan iklim, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) turut menjalankan program sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan pesisir dan sumber daya laut (marine-based). Di tahun 2020 ini, ICCTF mengelola dana hibah melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakarsa Segitiga Karang.

Sejak 12 Desember 2019 ICCTF telah mengumumkan *Call for Proposal* untuk program COREMAP-CTI dengan dana hibah dari Bank Dunia (World Bank) di media dan website ICCTF. Hingga 19 Maret 2020 hasil penilaian proposal telah dipublikasikan melalui website ICCTF dan juga disampaikan melalui surat kepada calon mitra pelaksana.

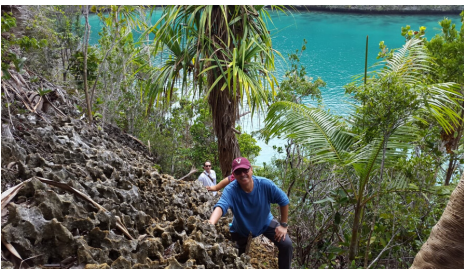
Dari hasil penilaian tersebut berikut mitra pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan untuk enam paket kegiatan untuk Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakarsa Segitiga Karang: Yayasan Terangi, Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Yayasan Reef Check Indonesia, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-IPB, dan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia

Paket 1	Paket 2	Paket 3
Pemanfaatan KKP oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Raja Ampat	Pemanfaatan KKP oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Laut Sawu	Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ National Plan of Action (NPOA) Jenis Terancam
Yayasan Terangi	WWF Indonesia	Reef Check Indonesia
Paket 4	Paket 5	Paket 6
Dukungan Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu/ICZM	Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas	Akses Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat
PKSPL IPB	Yayasan Terangi	Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)

### PROSES PENILAIAN PROPOSAL

Pengumpulan Proposal	In-depth Proposal Assessment	Persetujuan oleh Ketua Pokja COREMAP Grant Management & Ketua MWA
12 Des 2019- 12 Januari 2020	21 Januari-10 Februari 2020	11-20 Maret 2020
Administrative Assessment	Rapat Konsultasi dengan Bappenas dan Kementerian Terkait	Induction Workshop & Penandatanganan Kontrak
13-17 Januari 2020	Finalisasi 10 Maret 2020	23-27 Maret 2020

## KEGIATAN UJI TUNTAS UNTUK KOMPONEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DUE DILIGENCE)



ICCTF melakukan *Environmental and Social Due Diligence* (ESDD) terhadap usulan proposal guna menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan standar perlindungan lingkungan dan sosial COREMAP - CTI pada 5-8 Maret 2020 di Raja Ampat, Papua Barat. Kegiatan uji tuntas untuk komponen lingkungan dan sosial ini mengacu pada *Environmental and Social Safeguard Framework* (ESSF) COREMAP - CTI Bank Dunia serta *Environmental and Social Framework* (ESF) Bank Dunia. Selanjutnya, akan disusun usulan mitigasi risiko atau rencana perbaikan lingkungan dan sosial yang akan dilaksanakan oleh mitra pelaksana sebagai bagian dari implementasi paket kegiatan COREMAP-CTI dalam bentuk dokumen *Environmental and Social Action Plan* (ESAP).

## RANGKAIAN KEGIATAN ICCTF TRIWULAN PERTAMA 2020

Waktu	Kegiatan	Lokasi
07-Jan-20	Rapat Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penelitian Bioekonomi	Jakarta
27-Jan-20	Pembahasan Rencana Anggaran Biaya Penelitian Bioekonomi	Jakarta
27-Jan-20	Kick-Off Meeting Program <i>Oceans for Prosperity Laut Sejahtera (LAUTRA)</i>	Jakarta
28-Jan-20	ADB mengirimkan surat persetujuan atas <i>Loan and Grant Amendment Proposal</i> yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia	Jakarta
06-Feb-20	Pembahasan <i>Draft Amendment Grant Agreement</i> terkait Implementasi COREMAP-CTI ADB	Jakarta
Februari	Workshop pengenalan prosedur <i>World Bank Guidelines</i> untuk staff ICCTF	Jakarta
24-Feb-20	<i>Kick Off Meeting COREMAP-CTI ADB Mission</i>	Jakarta
27 Februari - 1 Maret 2020	Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan COREMAP-CTI ADB KE Stakeholders dan Pemerintah Daerah serta Tinjauan Lokasi Proyek	Nusa Tenggara Barat
02-Mar	Pertemuan Deputi Bidang KSDA Bappenas dengan CEO Rare membahas tindak lanjut <i>Blended Finance</i>	Jakarta
03-Mar	Partisipasi pada Workshop " <i>Blended Finance: Catalyzing Private Capital for the SDGs</i> "	Jakarta
04-Mar-20	<i>Penandatanganan Amendment to Loan and Grant Agreement COREMAP-CTI ADB</i> diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan	Jakarta
04-Mar-20	Pertemuan dengan Kemenko Bidang Maritim dalam rangka menyusun <i>Terms of Reference High-Level Policy Dialogue: Indonesia-Australia Blue Carbon</i>	Jakarta
05-08 Mar 2020	Kegiatan Uji Tuntas untuk komponen lingkungan dan sosial ( <i>Environmental and Social Due Diligence</i> )	Raja Ampat, Papua Barat
05-Mar-20	Pertemuan Pembahasan <i>Draft Memorandum of Understanding (MoU) COREMAP-CTI ADB Mission</i>	Jakarta
10-Mar-20	Rapat Persiapan Pembukaan Rekening Khusus (Reksus) Hibah COREMAP-CTI ADB	Jakarta
11-Mar-20	Penyusunan Peraturan Menteri Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah (Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM)	Jakarta
19-Mar-20	Pengumuman Hasil penilaian proposal COREMAP-CTI dana hibah World Bank	Online
18 Maret 200	Pengiriman Hasil Klusterisasi Kegiatan dan Penyusunan <i>Annual Workplan 2020</i> dana hibah ADB	Online
23-Mar-20	Penerimaan <i>No Objection Letter</i> terhadap AWP 2020 dana hibah ADB oleh Bappenas	Online
24-Mar-20	Partisipasi dalam Webinar " <i>Blue Bonds for a Blue Economy</i> " oleh Bank Dunia	Online Webinar
23-27 Maret 2020	Workshop Pengenalan Prosedur untuk Mitra Pelaksana COREMAP-CTI WB	Online

**Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) berupaya untuk mengintegrasikan isu-isu pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam salah satu agenda kerja yaitu Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Prakarsa Segitiga Karang yang merupakan salah contoh inovasi pembangunan berkelanjutan.**



## SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN COREMAP-CTI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



ICCTF bersama dengan Bappenas melaksanakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder. Terkait serta Tinjauan ke Lokasi Proyek di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27 Februari hingga 1 Maret 2020. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dan masukan dari aspek teknis maupun non teknis dari para pemangku kepentingan di lokasi program *Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)* dengan dana hibah dari Asian Development Bank.



Para pemangku kepentingan berharap dengan kehadiran program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di Provinsi NTB dapat membantu mewujudkan visi Provinsi NTB yaitu "Membangun NTB Yang Gemilang" yang diintegrasikan dalam misi NTB Asri dan Lestari. Upaya pelestarian lingkungan ini dinilai sangat berguna dalam meningkatkan atraksi wisata khususnya wisata selam di Gili Matra dan Gili Balu.



Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan tinjauan ke Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Gili Meno, Ayer dan Trawangan (Matra) yang merupakan lokasi implementasi Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang - Prakarsa Segitiga Karang. ICCTF bersama dengan Bappenas melakukan kunjungan dan pertemuan dengan kelompok masyarakat di Gili Ayer dan Gili Meno. Dari hasil kunjungan tersebut diketahui bahwa pola permasalahan yang dialami oleh masyarakat di kawasan tersebut ialah berkaitan dengan menurunnya kualitas ekosistem terumbu karang yang ditengarai oleh aktivitas pariwisata yang begitu masif.



Selain itu, minimnya pengetahuan serta fasilitas alat tangkap yang ramah lingkungan, ditambah dengan belum adanya kelompok perempuan yang berfokus pada aktivitas pengolahan hasil perikanan dan atau kerajinan tangan merupakan beberapa isu yang ditemukan ketika pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan ke Gili Matra. Beberapa masalah selama kunjungan ini menjadi pertimbangan dalam program Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang - Prakarsa Segitiga Karang yang akan segera dilaksanakan.

### Kondisi terumbu karang di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi NTB telah memiliki Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengelola luas perairan sebesar 2.915.934 Ha yang terbagi menjadi 11,7% Kawasan Konservasi, 85,2% Kawasan Pemanfaatan dan 3,1% Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Terumbu karang di Provinsi NTB dikategorikan berstatus buruk di lima wilayah meski terdapat beberapa kawasan yang masih mempunyai status terumbu karang yang baik. Kondisi ini dapat menjadi tantangan serta peluang dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang - Prakarsa Segitiga Karang. Faktor utama pemicu kerusakan terumbu karang ini adalah meningkatnya aktivitas destructive fishing, peningkatan aktivitas wisata di masing-masing kawasan yang juga berujung terhadap konsentrasi limbah domestik yang tinggi.

## PERTEMUAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPENAS DENGAN CEO RARE

Pada 2 Maret 2020 ICCTF bersama Bappenas melaksanakan rapat koordinasi terkait tindak lanjut inisiatif *blended finance* di bidang kelautan dan perikanan. Rapat ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dan CEO RARE bertempat di kantor Bappenas. Dalam rapat koordinasi ini RARE menyampaikan perkembangan data yang telah dimiliki berdasarkan studi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah *larval dispersal map*. RARE mengungkapkan kesediaannya untuk terus mendukung Bappenas dalam persiapan implementasi Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP). Dalam pertemuan ini disepakati mengenai penyempurnaan substansi pada konsep IPKP.

Implementasi *blended finance* di Indonesia akan diarahkan untuk mendukung implementasi pengelolaan perikanan berdasarkan wilayah. Wilayah kerja institusi ini akan dipusatkan di satu atau dua provinsi yang ekonominya bertumpu pada perikanan dan secara kemampuan ekonomi layak untuk melakukan pinjaman. Lokasi prioritas yang diusulkan sebagai *pilot project* adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian dari WPP 715. Pada periode kuartal pertama 2020 ini, inisiatif *blended finance* telah memasuki fase *arrangement*. Secara garis besar kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk pemetaan *mangement framework* penyaluran pinjaman dan penerbitan obligasi hijau



Inisiasi ini pertama kali dibahas dalam pertemuan *IMF-WB Annual Meetings* di Nusa Dua, Bali, pada bulan Oktober 2018. Pada awal tahun 2019 lalu, ICCTF-Bappenas dan NGO Internasional Rare berkolaborasi menyusun konsep Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP). Setelah melakukan proses penjajakan dengan berbagai lembaga Bank dan Non-Bank, PT. SMI kemudian terpilih sebagai host entity di dalam skema pendanaan IPKP. Minat kerjasama ini kemudian diresmikan melalui penandatanganan *Letter of Intent (LOI)* pada tanggal 9 Oktober 2019 antara Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas dengan Direktur Utama PT. SMI di Jakarta.



Inisiatif *blended finance* dalam bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu program ICCTF bersama Bappenas dalam bentuk inovasi pendanaan yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya target dari Tujuan Pembangunan Bersama nomor 14, yaitu: "Ekosistem Kelautan".

## INDONESIA MENUJU EKONOMI BIRU



WORLD BANK GROUP  
Environment, Natural Resources & Blue Economy

ISOP  
Indonesia Sustainable Ocean Program

Kementerian PPN,  
Bappenas

INDONESIA SUSTAINABLE DEVELOPMENT & INFRASTRUCTURE BBL SERIES

### BLUE BONDS FOR A BLUE ECONOMY

March 24, 2020  
11:00 AM - 13:00 PM GMT-7

Financing the blue economy in Indonesia will require significant investments for key sectors such as sustainable fisheries and aquaculture, marine and coastal tourism, as well as 'blue' ports. Globally, countries have been turning to innovative financing solutions to close this gap. The time is now for Indonesia to explore initiatives for blue bonds to support the transition to a blue economy.

**Chair**  
**Alessandra Campanaro**,  
World Bank Program Leader for Sustainable Development & Infrastructure

**Discussant**  
**André Rodrigues de Aquino**  
World Bank Sr. Natural Resources Management Specialist

**Presenters**

**Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc**  
Deputy for Maritime and Natural Resources, Indonesian Ministry for National Development Planning

**Mr. Patrick Payet**  
Secretary of State for Finance, Government of Seychelles

**Mr. Jan Robinson (TBC)**  
SWIOFish3 Project Manager, Government of Seychelles

**Mr. Julien Million**  
Senior Fisheries Specialist, World Bank

Pada tanggal 24 Maret 2020 ICCTF memfasilitasi Bappenas dalam Webinar “Blue Bonds for a Blue Economy” yang diorganisir oleh Bank Dunia. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc selaku Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Webinar yang dipandu oleh Alessandra Campanaro dan Andre Rodrigues de Aquino dari Bank Dunia ini dihadiri oleh 89 partisipan.

Secara umum kegiatan ini mengeksplorasi ide dan gagasan terhadap inisiatif *Blue Bonds* (Obligasi Biru) dalam rangka mendukung transisi Indonesia ke Ekonomi Biru, sekaligus merupakan pertukaran pengetahuan dan pembelajaran yang dipetik dari penerbitan obligasi biru yang telah dilakukan oleh Republik Seychelles.

Berdasarkan hasil diskusi, mekanisme *Blue Grants Fund* dan *Blue Investment Funds* yang telah dilaksanakan di Republik Seychelles dapat dijadikan sebagai contoh untuk diterapkan di Indonesia dengan beberapa modifikasi tertentu. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa mekanisme *blended finance* di Indonesia akan diarahkan untuk mendukung implementasi perikanan berkelanjutan yang berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

## SEKILAS OBLIGASI BIRU

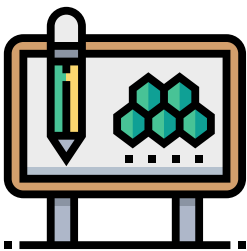
Efek dari perubahan iklim, aktivitas manusia dan beban lainnya dapat dirasakan oleh laut, karena kita telah kehilangan hampir setengah dari terumbu karang dunia. Terumbu karang sangat penting bagi keanekaragaman hayati lautan karena mendukung seperempat dari semua spesies laut dan ratusan juta orang bergantung padanya untuk mata pencaharian, nutrisi, dan kesejahteraan sosial ekonomi mereka.

Solusi keuangan yang inovatif diperlukan untuk meningkatkan ketahanan laut dan pesisir. Keuangan biru (*blue economic*) khususnya obligasi biru, memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi tantangan ini. Obligasi biru merupakan instrumen pembiayaan laut inovatif yang dibesarkan dengan dana khusus untuk proyek-proyek yang dianggap ramah laut. Ekonomi biru semakin penting dan mendapatkan momentum di antara para pembuat kebijakan di seluruh dunia.

## PERSIAPAN PENELITIAN BIOEKONOMI

Pada tanggal 7 Januari 2020, ICCTF bersama Bappenas mengadakan rapat Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai basis administrasi pelaksanaan penelitian bioekonomi. ICCTF mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan tata kelola perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - yang merupakan salah satu amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kegiatan ini melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong serta pihak swasta dari Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI).



Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data, simulasi analisa, dokumentasi dan naskah akademik sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan (*science-based policy*) terkait parameter biologi dan ekonomi yang akan digunakan dalam memperbaiki tata kelola perikanan di WPP 718 (Laut Arafura).

WPP 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur merupakan salah satu tujuan utama daerah penangkapan udang dan ikan di Indonesia. Estimasi potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718 mencapai 13% dari potensi sumberdaya ikan laut nasional. Udang dan ikan demersal memiliki kontribusi terhadap produksi perikanan laut nasional masing-masing sekitar 45% dan 20%. Udang dan ikan demersal telah lama menjadi sasaran utama kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718 oleh armada perikanan yang beroperasi.

Beberapa langkah koordinasi dengan para mitra kegiatan penelitian dilakukan oleh ICCTF dengan mengundang perwakilan LIPI, KKP, HPPI, dan mitra lainnya. Hal ini ditujukan untuk membahas pola kemitraan, alur perizinan, juga ruang keterlibatan/partisipasi pelaku usaha/swasta dalam kegiatan.

Dalam langkah-langkah koordinasi ini, diidentifikasi beberapa poin kunci seperti LIPI sebagai Instansi/Lembaga yang akan menjadi penanggung jawab kegiatan, alur dan jenis perizinan, serta ruang keterlibatan pelaku usaha/ swasta sebagai kontributor data.





# SUPPORTING THE INDONESIAN GOVERNMENT FOR A BETTER CLIMATE



[www.icctf.or.id](http://www.icctf.or.id)

-  Indonesia Climate Change Trust Fund
-  ICCTFOfficial
-  ICCTF\_ID
-  ICCTFOfficial

Lippo Kuningan 15th Floor Unit D-E  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12,  
 Jakarta 12940, Indonesia  
 Phone: (+62 21) 80679386  
 (Hunting)  
 Fax : (+62 21) 80679387  
 Email: [secretariateicctf.or.id](mailto:secretariateicctf.or.id)

